

Dana Hibah Belum Dipertanggungjawabkan

DEMAK - Dari 1.721 lembaga penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013, sampai saat ini, ada 34 lembaga yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj).

Bansos yang bersumber dari APBD tersebut, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng.

Demikian disampaikan Kabag Kesra Setda Demak, Johar Arifin, saat sosialisasi Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Hibah Bansos di Gedung Bina Praja.

Menurutnya, 34 lembaga tersebut belum mempertanggungjawabkan penggunaan Bansos total senilai Rp 600 juta.

"Semula yang belum me-

nyerahkan LPj ada 64 lembaga dengan total nominal bantuan senilai Rp 1,7 miliar. Setelah dikejar, sekarang tinggal 34 lembaga yang total nilainya Rp 600 juta," ujarnya.

Sesuai aturan, setiap penerima Bansos wajib menyerahkan LPj paling lambat satu bulan setelah bantuan dicairkan.

Pihaknya sudah tiga kali memberikan surat kepada penerima Bansos yang belum memberikan LPj untuk segera membuat LPj.

Temuan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPK-KD) Demak, Iskandar menambahkan, adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban membuat

BPK mengidentifikasi sebagai temuan. Bahkan, ada Bansos dari APBD 2012 yang belum dipertanggungjawabkan sampai sekarang.

Total nominalnya, terang dia, ada Rp 30 miliar. Dia berharap SKPD penyalur dana hibah ini agar bertindak tegas.

Pada TA 2014, alokasi dana hibah yang akan disalurkan sebesar Rp 82.866.810.000. Dana sebesar itu terbagi menjadi tiga kelompok, yakni untuk badan atau organisasi Rp 68.400.945.000, kelompok atau anggota (Rp 11.451.815.000) dan belanja BOS sekolah swasta (Rp 3.014.050.000).

Adapun alokasi Bansos dari APBD 2014 totalnya mencapai Rp 4.224.025.000. (J9-64)